



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANNA SEPTYOWATI
- Jabatan : KEPALA UNIT
- NHK : 809833

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI		Rp. 2.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI		Rp. 850.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	372.700.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI		Rp. 12.700.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI		Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI		Rp. 130.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI		Rp. 220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	223.660.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	603.606.534
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.849.966.534
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.849.966.534

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.